

MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs

17 sasaran SDGs yang ambisius tidak akan tercapai pada 2030 jika hanya mengandalkan upaya-upaya yang sekedarnya. Peningkatan kapasitas nasional untuk menyusun kebijakan publik yang terpadu, inovasi, dan pendayagunaan sumber pendanaan alternatif merupakan pendekatan strategis untuk mewujudkan tercapainya SDGs pada 2030.

Coherence

Coherence – atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ‘terpadu’ – adalah prinsip SDGs yang menekankan pada harmonisasi antar lembaga dalam penyusunan kebijakan publik. Peraturan pemerintah yang tumpang tindih adalah contoh permasalahan klasik kebijakan publik yang tidak terkoordinasi. Berikut contoh penerapan *Coherence* dalam menyinkronkan kebijakan publik:

Nasional

Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memandatkan terbentuknya ‘Tim Koordinasi Nasional’ untuk pencapaian sasaran SDGs.

Sub-nasional

Keputusan Gubernur Riau No: Kpts.187/III/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Riau Tahun 2017-2019

Contoh di atas menggambarkan keterpaduan lembaga di tingkat nasional dan sub-nasional. Selain itu, keterpaduan kebijakan publik secara horizontal juga tidak kalah pentingnya. Keterpaduan dalam tata kelola pemerintahan memegang peran kunci untuk memastikan bahwa dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan di SDGs tercapai pada 2030.

Innovation

Inovasi untuk pembangunan adalah bagaimana menemukan solusi efektif untuk menyelesaikan tantangan pembangunan. Salah satu contoh inovasi yang dilakukan UNDP di Indonesia adalah melalui **Local & Urban Governance Dashboard**.

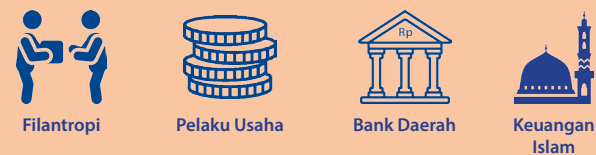
Local & Urban Governance Dashboard



Local & Urban Governance Dashboard adalah alat visualisasi data dan rekomendasi pembangunan – yang menggabungkan: 1) data kuantitatif pembangunan daerah, 2) data kualitatif persepsi publik atas kinerja Pemda, dan 3) rekomendasi pembangunan. SDGs Dashboard digunakan untuk memfasilitasi Pemda dalam merumuskan kebijakan publik dan mengintegrasikan agenda SDGs ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Alternative Finance

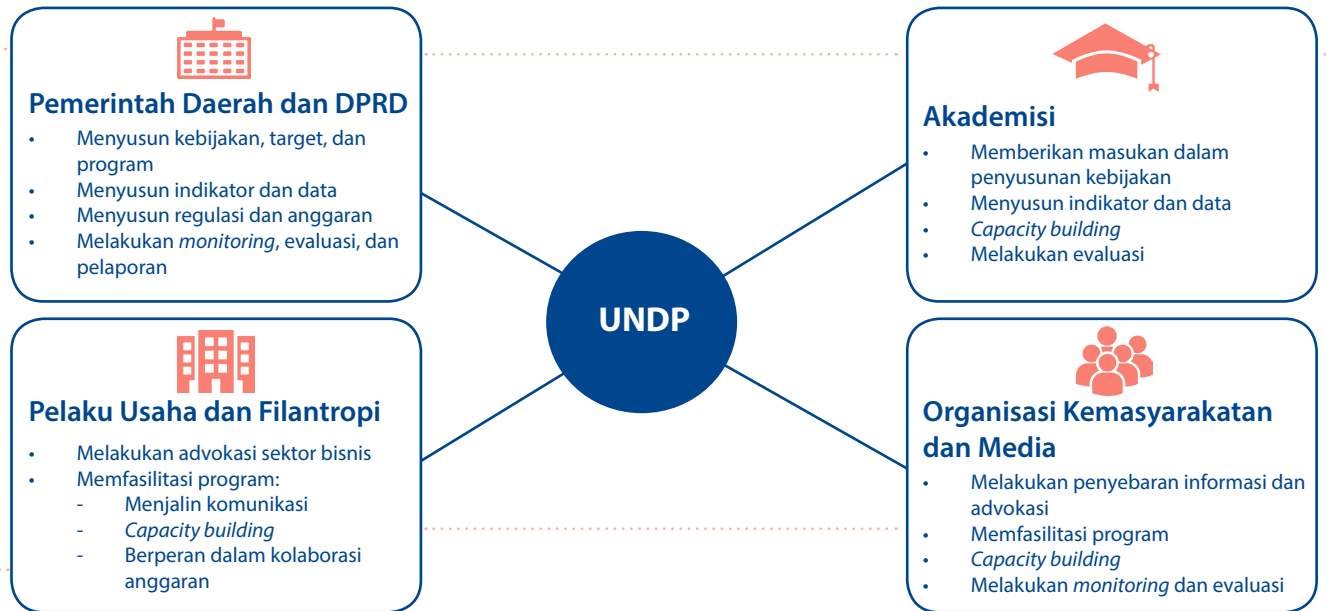
Pendanaan pembangunan yang sangat bergantung pada bantuan luar negeri adalah salah satu pelajaran yang dapat diambil dari MDGs. Tantangan ini coba dijawab oleh SDGs dengan mendayagunakan sumber pendanaan alternatif.



Di Indonesia, pendanaan SDGs tidak lagi bergantung pada bantuan luar negeri. Saat ini, sumber pendanaan domestik – misalnya APBD – dikolaborasi dengan sumber pendanaan alternatif yang sebelumnya tidak optimal dijajaki. UNDP di Indonesia menjajaki berbagai sumber pendanaan alternatif, misalnya pendanaan yang bersumber dari bank daerah dan filantropi, pendanaan SDGs dengan zakat (berkerjasama dengan BAZNAS), *crowdfunding* untuk menyelamatkan harimau Sumatera, serta membangun kerjasama dengan pelaku usaha.

4 PILAR PEMANGKU KEPENTINGAN SDGs DI INDONESIA

Sebagai upaya mengadvokasikan integrasi SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah, UNDP mendorong para pemangku kepentingan SDGs untuk saling bermitra dan berpartisipasi aktif sesuai dengan perannya masing-masing.



DAFTAR ISTILAH

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Pemda	: Pemerintah Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional	RAD	: Rencana Aksi Daerah
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SDGs	: Sustainable Development Goals
MDGs	: Millennium Development Goals	TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		TI	: Teknologi Informasi
		UNDP	: United Nations Development Programme

Informasi lebih lanjut:

UNDP Indonesia
Juliaty Ansye Sopacua, SDGs Advisor
Democratic Governance and Poverty Reduction Unit

Menara Thamrin Building, 9th Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 | Jakarta 10250, Indonesia
Phone: +62 21 2980 2300 (ext. 802)

STRATEGI INTEGRASI SDGs KE DALAM AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH



SDGs DAN AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH

Pada 2015, negara-negara anggota PBB menyepakati 17 Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan memastikan terlaksananya pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola yang inklusif.

17 SDGs memiliki target yang berhubungan dengan agenda pembangunan daerah. Sebagai pembuat kebijakan, Pemda memegang peran kunci dalam menghubungkan SDGs dengan masyarakat. Pemda berperan dalam mengoordinasikan integrasi SDGs ke dalam kebijakan pembangunan, yang disesuaikan dengan potensi dan tantangan di daerah masing-masing.



TAHAPAN INTEGRASI SDGs KE DALAM AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH



TAHAPAN INTEGRASI SDGs KE DALAM AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH

1. Penguatan Kelembagaan & Kebijakan

Langkah pertama adalah sosialisasi SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan, yang diikuti dengan pembentukan Tim Koordinasi SDGs Daerah (yang keanggotaannya mencakup seluruh pemangku kepentingan, dan pelaksanaannya dipimpin oleh Kepala Bappeda). Tim Koordinasi SDGs Daerah disahkan oleh Surat Keputusan Gubernur/Bupati.

2. Penyusunan Kebijakan: Perencanaan & Penganggaran Pembangunan

Tim Koordinasi SDG Daerah mengoordinasikan pemetaan keselarasan antara RPJMD dan SDGs, penentuan indikator SDGs daerah, dan penyusunan RAD SDGs, yang prosesnya melibatkan pertemuan pemangku kepentingan dan konsultasi publik.

Untuk memfasilitasi proses tersebut, UNDP mengembangkan 'Local &

Urban Governance Dashboard' – yang dapat mendukung proses perencanaan dan penganggaran program pembangunan (lihat 'Mendukung Pencapaian SDGs' di halaman selanjutnya).

3. Aksi

Untuk mempercepat pencapaian SDGs, perlu prioritas fokus pembangunan. Salah satu program percepatan pencapaian SDGs adalah dengan memilih desa percontohan, yang disebut dengan Desa SDG. Desa SDG terpilih akan menerapkan program pembangunan prioritas yang mengacu kepada RAD SDGs, dimana a) pengelolaan program dipimpin oleh aparatur desa; b) pendanaan program melibatkan dukungan pihak non-pemerintah; dan c) pelaksanaan program melibatkan konsultasi publik.

4. Pemantauan Capaian

Baseline Study diperlukan untuk memantau capaian awal SDGs. Kemudian, perlu dikembangkan ekosistem data berbasis TI untuk memotret kema-

juan capaian SDGs dan untuk memetakan kontribusi pemangku kepentingan terkait dalam capaian tersebut.

Selanjutnya, perlu disusun laporan pencapaian SDGs yang komprehensif untuk didistribusikan kepada seluruh pemangku kepentingan SDGs.

5. Advokasi, Manajemen Pengetahuan & Peningkatan Kapasitas

Upaya integrasi SDGs membawa pengalaman berharga yang dapat dirangkum oleh Pemda ke dalam berbagai bentuk produk pengetahuan – misalnya brosur atau buku saku. Pemda juga dapat berbagi pengetahuan melalui seminar, lokakarya, atau pelatihan, yang akan membantu meningkatkan kapasitas pihak terkait dalam mendukung pencapaian SDGs. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan baik di tingkat daerah maupun nasional.

